

ABSTRAK

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesiapan dan disiplin pegawai negeri sipil sehingga ada peraturan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan peraturan tentang disiplin yang di dalamnya terdapat nilai-nilai birokrasi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Meskipun sudah ada serangkaian peraturan mengenai PNS dan disiplin namun dalam kenyataan yang ada dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia masih muncul beberapa pelanggaran-pelanggaran terkait dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya permasalahan dalam birokrasi pemerintahan karena masih ditemukan beberapa pelanggaran dalam hal pelaksanaan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perlu adanya upaya-upaya untuk mendisiplinkan birokrasi pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penegakan disiplin di Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat data dari empat tahun terakhir 2012-2015 sejak diberlakukannya peraturan disiplin telah terjadi penurunan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Penurunan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin menunjukkan roda pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Jepara berjalan dengan baik (*good governance*) karena Pegawai Negeri Sipil secara umum sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik selaku aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.

Untuk mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jepara, telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi yang diikuti dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Hari dan Jam Kerja Efektif serta Pelaksanaan Apel dan Presensi Sidik Jari (*fingerprint*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana di dalamnya secara tegas mengatur *reward and punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir, tidak mengikuti apel pagi hari dan siang hari.

Kata kunci : Tata pemerintahan yang baik, Disiplin PNS.

ABSTRACT

The purpose of national development is to create a just society and a prosperous, equitable and sustainable between the material and spiritual, based on Pancasila in the Unitary State of the Republic of Indonesia. In order to achieve above national bureaucracy needed for good governance (good governance). Smooth running of the administration and national development mainly depends on the readiness and discipline of civil servants so that there are regulations governing Civil Servants in performing their duties and rules of discipline that bureaucratic values of good governance.

Although there have been a series of regulations on civil servants and disciplined, but in reality that exists in bureaucratic governance in Indonesia still appears some violations related to the discipline of Civil Servants. With the problems in the bureaucracy of government because they found some violations in the implementation of the rules of discipline of the Civil hence the need for efforts to discipline the bureaucratic governance.

The method used in this research is the study of *juridis sociologic* which is the study of the law by view the function of law in fact and to know of law how it used in social environment and its context. Data was collected through observation, interviews and documentation.

Enforcement of discipline in Jepara regency government in accordance with Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants has been implemented properly. It can be seen the data from the last four years 2012-2015 since the implementation of disciplinary rules there has been a decrease in the number of Civil Servants who commit disciplinary offenses. The decline in the number of Civil Servants who violate the discipline shows the way the wheels of government in Jepara regency government goes well (good governance) for the Civil Service in general has been carrying out the duties and functions well as state officials, civil servants and public servant.

To discipline the Civil Servants in Jepara, has made efforts such as by issuing Regulation Jepara Regent No. 44 Year 2012 on Supplementary Income Regional Civil Servants Based on Workload, Job Performance, Points Served and Scarcity profession followed by decree Jepara No. 2 Year 2013 About the days and Hours of Work Effectively and Implementation apples and Presence Fingerprint in Jepara regency government where in it is expressly regulate reward and punishment for Civil Servants are not present, do not follow the apple in the morning and during the day.

Keywords: Good Governance, Discipline PNS.